

IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RISIKO FRAUD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025

No	Nama Unit Kerja	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab			Dampak			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tidak Pengendalian	Pemberi Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian			
									Uraian	Skenario Risiko (Isiapa Keho) melakukan apa (keter) (keter)	Kode Risiko	Pemicu	Uraian	Sumber	CIUC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak*)						Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
																										Uraian
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa
1	Kecamatan Babat	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sinergitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Nilai Saktip 2. Nilai Manajemen Risiko	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu		-	Risiko Operasional : Data yang dibuktikan untuk menyusun dokumen belum tertata rapi	ROO 25.99.37.1	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan / PPTK	Data berasal dari berbagai sumber/Unit sehingga format tidak seragam	1. Internal 2. Eksternal	C	Proses penyusunan dokumen menjadi lambat	Kecamatan				Koordinasi internal saat penyusunan dokumen	Belum tersedia format buku pengumpulan dan penyimpanan data	Menyusun dan menetapkan format buku pengumpulan data	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan / PPTK	Desember 2025	
									-	Risiko Kemitraan : Petunjuk Teknis tentang penyusunan dokumen kurang memadai	ROO 25.99.37.1	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan / PPTK	Sosialisasi petunjuk teknis kepada pelaksana belum optimal	Eksternal	C	Terjadi perbedaan pemahaman dalam penyusunan dokumen	Kecamatan				Koordinasi dengan kecamatan lain	Tidak tersedia contoh dokumen atau template buku	Meningkatkan komunikasi dengan OPD terkait mengenai petunjuk teknis penyusunan dokumen agar dibuat lebih rinci	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan / PPTK	Desember 2025	
									-	Risiko Fraud : Terjadinya manipulasi data administratif dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja agar terlihat selesai tepat waktu.	ROO 25.99.37.1	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan / PPTK	Tidakannya untuk memenuhi target kepatuhan waktu penyusunan dokumen	Internal	C	Menurunnya akuntabilitas dan kredibilitas instansi	Kecamatan				Adanya jadwal dan tenggat waktu penyusunan dokumen	Dokumentasi proses penyusunan belum lengkap	Menyusun checklist pengendalian internal dalam penyusunan dokumen	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan / PPTK	Desember 2025	
2	Kecamatan Babat	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sinergitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Nilai Saktip 2. Nilai Manajemen Risiko	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu		-	Risiko Operasional : Gangguan sistem aplikasi keuangan SPD	ROO 25.99.37.2	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan / PPTK	Gangguan jaringan internet atau server	Eksternal	C	Terhambatnya pencairan anggaran	Kecamatan				Koordinasi dengan admin SPD dan instansi terkait	Tidak adanya sistem alternatif ketika SPD mengalami gangguan	Menyapkan data dan dokumen pendukung secara offline sebelum input SPD	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan / PPTK	Januari - Desember 2025	
									-	Risiko Kemitraan : Terlambatnya penyampaian data untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan	ROO 25.99.37.2	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan / PPTK	Kurangnya koordinasi dan komitmen mitra kerja	Eksternal	C	Tidak tercapainya target kinerja kepatuhan waktu laporan keuangan	Kecamatan				Penyampaian jadwal penyusunan laporan keuangan kepada unit terkait	Belum adanya komitmen tertulis dengan mitra kerja	Memperkuat komunikasi dan koordinasi melalui forum atau media resmi	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan / PPTK	Januari - Desember 2025	
									-	Risiko Fraud : Mark up harga pengadaan barang	ROO 25.99.37.2	PPK	1. Kurangnya integritas pegawai 2. Kelalaian PPK dengan tidak melihat SHH	Internal	C	Kerugian Daerah	Pemerintah Daerah			Adanya SOP	1. Kurang kesadaran dari pegawai 2. Kurang memahami aturan yang berlaku	pengawasan dan evaluasi pengadaan secara berjenjang		PPK	Januari - Desember 2025	
3	Kecamatan Babat	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sinergitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Nilai Saktip 2. Nilai Manajemen Risiko	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang Dan Jasa Yang Tepat Waktu		-	Risiko Operasional : Anasir penting rusak, hilang, atau tidak terdokumentasi dengan baik.	ROO 25.99.37.2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Belum ada sistem pengarsipan buku 2. Tidak ada persediaan anasir penting dalam bentuk digital	Internal	C	Terhambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Kecamatan				Pengelompokan anasir berdasarkan jenis kegiatan Anasir dikompilasi secara sederhana (surat masuk surat keluar, keuangan, dan kegiatan)			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari - Desember 2025	
									-	Risiko Kemitraan : Saat pengadaan barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi	ROO 25.99.37.2	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan / PPTK	1. Surat pesanan tidak rinci 2. Pihak ketiga mengirim barang secara sepihak tanpa konfirmasi	1. Internal 2. Eksternal	C	1. Kualitas barang tidak sesuai 2. Potensi Kerugian Daerah	Kecamatan				1. Surat pesanan sudah ada 2. BAST sudah ada	1. Kelalaian PPK dalam membuat surat pesanan 2. Neta kepatuhan antara kecamatan dan pihak ketiga jika tidak terdapat kesesuaian di kemudian hari		Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan / PPTK	Januari - Desember 2025	
									-	Risiko Fraud : Penyralnggunaan barang-barang logistik kantor untuk kepentingan pribadi.	ROO 25.99.37.2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pengawasan terhadap penggunaan barang logistik belum optimal	Internal	C	Menurunnya ketersediaan barang logistik untuk kegiatan kepegawaian	Pemerintah Daerah				Penggunaan Kartu Stock Opname	Pengawasan baik terhadap barang logistik masih lemah.	Meningkatkan pengawasan oleh atasan langsung dan pengelika logistik	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari - Desember 2025	

No	Nama Unit Kerja	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Sebab		C.A.U.C	Dampak			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian			
									Uraian	Skenario Risiko (tata laksana) melakukan apa (what)	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena						Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
4	Kecamatan Babat	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sinergitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Nilai Sakip 2. Nilai Manajemen Risiko	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Uraian Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah		Risiko Operasional - Gangguan sistem pengadaan secara elektronik (SPS/le-purchasing) yang menghambat kelancaran proses pemilihan penyedia.	ROO 25.99.37.4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Gangguan teknis sistem karena server overload saat trafik tinggi (tidak ada tender/le-purchasing)	Eksternal	C	Terjadinya proses pengadaan barang/jasa, sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai perencanaan	Kecamatan	Koordinasi dengan LPSE daerah/pusat ketika terjadi gangguan sistem	Monitoring sistem belum bersifat proaktif, masih menunggu laporan gangguan	Meningkatkan monitoring dan komunikasi aktif dengan LPSE dan LPP, terutama pada periode awal pengajuan	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan / PPKK	Jul 2025				
									Waktu kemiripan - Kurangnya tanggapansi dan komunikasi antara perangkat daerah dan penyedia barang yang menyebabkan kesalahpahaman dalam	ROO 25.99.37.4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dokumen kontrak dan spesifikasi teknis kurang rinci, sehingga menimbulkan interpretasi berbeda.	1. Internal 2. Eksternal	C	Terjadinya kesalahan pelaksanaan pekerjaan kontrak, baik dari sisi volume, mutu, maupun waktu	Kecamatan	Penunjukan PPK dan penguas pekerjaan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kontrak.	Belum ada standar komunikasi formal antara perangkat daerah dan penyedia.	Peningkatan kualitas dokumen kontrak dan spesifikasi teknis, agar jelas dan tidak multitafsir.	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan / PPKK	Jul 2025				
									Risiko Fraud - Mark-up harga barang dalam penyusunan HPS yang tidak sesuai dengan harga pasar	ROO 25.99.37.4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Ketergantungan pada satu sumber harga, seperti penawaran penyedia tertentu.	Internal	C	Menurunnya kepercayaan publik dan penyedia terhadap proses pengadaan.	Pemerintah Daerah	Penggunaan referensi harga dari e-Katalog, daftar harga resmi, atau hasil survey pasar.	Penggunaan data harga historis tanpa perbandingan berkala	Melakukan perbandingan data harga secara berkala, terutama untuk barang dengan fluktuasi harga tinggi.	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan / PPKK	Jul 2025				
5	Kecamatan Babat	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sinergitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Nilai Sakip 2. Nilai Manajemen Risiko	Penyediaan Jasa Penunjang Uraian Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Uraian Pemerintahan Daerah		Risiko Operasional Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja penyedia jasa sehingga kualitas layanan tidak sesuai.	ROO 25.99.37.5	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tidak adanya sistem penilaian kinerja penyedia sebagai dasar evaluasi lanjutan.	Internal	C	Kualitas layanan pemeliharaan	Kecamatan	Pemeriksaan hasil pekerjaan sebelum serah terima (BAST).	Hasil evaluasi tidak dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan atau penilaian ulang penyedia.	Menerapkan monitoring dan evaluasi berkala, disertai laporan tertulis dan dokumentasi.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Desember 2025				
									Risiko Kemiripan - Penyedia jasa menaikan harga layanan secara sepihak yang berpotensi mengganggu operasional pemerintahan daerah.	ROO 25.99.37.6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya komunikasi dan mekanisme eskalasi masalah antara PPK dan penyedia.	1. Internal 2. Eksternal	C	Keterlambatan pencapaian target kinerja OPI.	Kecamatan	Belum ada klausul layanan minimum (Service Level Agreement/SLA) yang jelas	Memperkuat klausul kontrak, termasuk layanan penghapusan layanan sepihak dan mekanisme hukumannya	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari - Desember 2025					
									Risiko Fraud - Mark up harga pengadaan barang dari harga pasaran untuk kepentingan tertentu.	ROO 25.99.37.6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Ketergantungan pada satu sumber harga, seperti penawaran penyedia tertentu.	Internal	C	Menurunnya kepercayaan publik dan penyedia terhadap proses pengadaan.	Kecamatan	Penggunaan referensi harga dari e-Katalog, daftar harga resmi, atau hasil survey pasar.	Penggunaan data harga historis tanpa perbandingan berkala	Melakukan perbandingan data harga secara berkala, terutama untuk barang dengan fluktuasi harga tinggi.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari - Desember 2025				
6	Kecamatan Babat	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sinergitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Nilai Sakip 2. Nilai Manajemen Risiko	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uraian Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Risiko Operasional Kerusakan akibat keterlambatan pemeliharaan harani atau	ROO 25.99.37.6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tidak adanya jadwal pemeliharaan rutin yang baku	Internal	C	Umur manfaat aset menjadi lebih pendek	Kecamatan	Pengajuan pemeliharaan atau perbaikan jika terjadi kerusakan	Proritas anggaran pemeliharaan belum jelas	Menyusun dan menetapkan jadwal pemeliharaan rutin (preventive)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari - Desember 2025				
									Risiko Kemiripan - Perbedaan interpretasi spesifikasi teknis	ROO 25.99.37.6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Spesifikasi teknis disusun kurang rinci dan tidak operasional, sehingga multitafsir	1. Internal 2. Eksternal	C	Hasil pekerjaan tidak sesuai kebutuhan dan standar yang diharapkan	Kecamatan	Penyusunan spesifikasi teknis sebagai bagian dari dokumen pengadaan.	Tidak ada format baku penyusunan spesifikasi teknis.	Menyusun spesifikasi teknis secara rinci, dan tidak multitafsir, dengan parameter mutu.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari - Desember 2025				
									Risiko Fraud - Pekerjaan BAST pemeliharaan dilaporn tapi tidak dilakukan.	ROO 25.99.37.6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Keterlambatan waktu dan SDM pengawas/PPK.	Internal	C	Penurunan kualitas dan fungsi aset daerah akibat tidak dilakukan pemeliharaan	Pemerintah Daerah	Kewajiban penyedia menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan.	Tidak ada checklist atau standar pemeriksaian pemeliharaan.	Menyusun checklist standar pekerjaan pemeliharaan sebagai alat verifikasi pengawas	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari - Desember 2025				

No	Nama Unit Kerja	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		Dampak					Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tidak Pengendalian	Pemilik/Penganggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian						
									Uraian	Skenario Risiko (tata laka) melakukan apa (what?)	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C.I.C	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)						Skala Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
7	Kecamatan Babat	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sinergitas	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	Penyelenggaraan Uraian Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Uraian Pemerintahan yang Dilaksanakan Kecamatan		Risiko Operasional : Keterlambatan pelayanan akibat antrian, sistem offline, atau SCM terbatas.	ROO.25.99.37.7	Kasi Pelayanan Publik	1	Eksternal	C	Waktu tunggu pelayanan mandiri panjang dan tidak sesuai standar.	Kecamatan							Pengaturan jam layanan dan pembagian tugas petugas	Belum tersedia rencana layanan darurat saat sistem offline.	Menyusun SOP pelayanan saat sistem offline, termasuk mekanisme layanan manual sementara	Kasi Pelayanan Publik	Januari - Desember 2025			
									Risiko Kemiripan : Keterlambatan pendistribusian barang kependudukan dari mitra layanan	ROO.25.99.37.7	Kasi Pelayanan Publik	1	Internal	C	Koordinasi dan komunikasi dengan mitra layanan belum terstruktur	Kecamatan					Berkoordinasi terkait waktu pendistribusian blanko	Monitoring respon mitra belum berbasis data dan waktu respon aktual	Menyusun kartu stok opname sehingga dapat memanjajem jumlah blanko	Kasi Pelayanan Publik	Januari - Desember 2025					
									Risiko Fraud : Percobaan atau pelayanan melalui pihak ketiga tidak resmi	ROO.25.99.37.7	Kasi Pelayanan Publik	1	Eksternal	C	Masyarakat lebih menggunakan biro jasa untuk mengurus berkas kependudukan	Kecamatan					Penempatan petugas pelayanan resmi di loket pelayanan	Masyarakat masih memiliki prinsip bila mengurus melalui biro jasa bisa lebih cepat	Pemasangan informasi Anti Percobaan & Anti Pungli secara jelas dan mesif.	Kasi Pelayanan Publik	Januari - Desember 2025					
8	Kecamatan Babat	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sinergitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Nilai Sakip 2. Nilai Manajemen Risiko	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan		Risiko Operasional : Keterlambatan pelaksanaan kegiatan akibat jadwal desa tidak seragam	ROO.25.99.37.8	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Eksternal	C	Perubahan jadwal desa yang mendadak tanpa pemberitahuan lebih awal.	Kecamatan							Koordinasi awal dengan pemerintah desa sebelum pelaksanaan kegiatan	Ketertarikan pada kegiatan desa tanpa rencana alternatif.	Menyusun dan menyepakati kalender kegiatan bersama dengan pemerintah desa sejak awal tahun	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Januari - Desember 2025			
									Risiko Kemiripan : Kontinen pemerintah desa tidak seragam terhadap program pemberdayaan	ROO.25.99.37.8	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Internal	C	Perbedaan prioritas pembangunan antar desa, sesuai kebutuhan dan kebijakan masing-masing	Kecamatan					Monitoring dan evaluasi program pemberdayaan	Pendampingan belum dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.	Pendampingan intensif dan terpadu kepada desa sasaran	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Januari - Desember 2025					
									Risiko Fraud : Mark-up biaya kegiatan koordinasi	ROO.25.99.37.8	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Internal	C	PPTK selaku pemilik kegiatan melakukan Mark-Up harga untuk kepentingan pribadi	Kecamatan					Penggunaan referensi harga dari e-Katalog, daftar harga resmi, atau hasil survey pasar	Penggunaan data harga historis tanpa perubahan berkala	Melakukan perubahan data harga secara berkala, terutama untuk barang dengan fluktuasi harga tinggi	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Januari - Desember 2025					
9	Kecamatan Babat	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sinergitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Nilai Sakip 2. Nilai Manajemen Risiko	Pembudayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan		Risiko Operasional : Keterlambatan kapasitas kader PKK (administrasi, pelaporan, inovasi)	ROO.25.99.37.9	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	Internal	C	Pergantian kader tanpa proses ah pengetahuan yang memadai.	Kecamatan							Sosialisasi program dan kegiatan PKK secara berkala	Pelatihan administrasi dan pelaporan belum terjadwal secara rutin	Penyelenggaraan pelatihan teknis administrasi dan pelaporan PKK secara berkala	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari - Desember 2025			
									Risiko Kemiripan : Pergantian pengurus PKK mengganggu kesinambungan program.	ROO.25.99.37.9	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	Internal	C	Dokumentasi program dan kegiatan tidak lengkap atau tidak terdokumentasi	Kecamatan					Koordinasi internal antar pengurus PKK	Rencana kerja jangka menengah PKK belum berdiskusi dengan baik	Menyusun dan memutakhirkan dokumen rencana kerja PKK.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari - Desember 2025					
									Risiko Fraud : Mark-up biaya kegiatan (konsultasi, ATK, pelatihan)	ROO.25.99.37.9	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	Internal	C	PPTK selaku pemilik kegiatan melakukan Mark-Up harga untuk kepentingan pribadi	Kecamatan					Penggunaan referensi harga dari e-Katalog, daftar harga resmi, atau hasil survey pasar	Penggunaan data harga historis tanpa perubahan berkala	Melakukan perubahan data harga secara berkala, terutama untuk barang dengan fluktuasi harga tinggi	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari - Desember 2025					

No	Nama Unit Kerja	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Sebab		C.A.C	Dampak		Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tidak Pengendalian	Pemilik/Pesanggraha Jawab	Target Waktu Penyelesaian		
									Uraian	Skenario Risiko (tata laksana) melakukan apa (what)	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Fihak yang Terkena	Skala Dampak(*)	Skala Kemungkinan(*)						Skala Risiko	
																										Uraian
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	x	y	z	aa	
10	Kecamatan Babat	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sinergitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Nilai Sakip 2. Nilai Manajemen Risiko	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kemitraan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Pembinaan Poksi Dan Lintas Yang Dilaksanakan		Risiko Operasional : Informasi kejadian tidak akurat atau terlambat diterima.	ROO.25.99.37.10	Kasi Trantumb	Keterlambatan pada laporan manual atau lain, tanpa verifikasi data	Internal & Eksternal	C	Pengangan kejadian tidak optimal, berpelosi memperbesar dampak.	Kecamatan & Masyarakat						Penyampaian laporan kejadian melalui jalur koordinasi yang ada	Belum ada SOP pelaporan kejadian yang jelas dan terukur.	Menyusun dan menetapkan SOP pelaporan kejadian, termasuk alur, format dan batas waktu pelaporan.	Kasi Trantumb	Januari - Desember 2025
									Risiko Kemitraan : Tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kurang berpartisipasi dalam upaya pencapaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum.	ROO.25.99.37.10	Kasi Trantumb	Keterbatasan waktu dan kesibukan tokoh masyarakat.	Eksternal	C	Behan penanganan sepenuhnya berada pada aparat pemerintah.	Kecamatan						Koordinasi dengan pemerintah desa/keurahan dalam penanganan Trantumb.	Keterlibatan tokoh masyarakat masih rendah.	Membentuk forum komunikasi Trantumb tingkat desa/kecamatan dan melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan.	Kasi Trantumb	Januari - Desember 2025
									Risiko Fraud : Mark-up biaya kegiatan Penggembangan anggaran konsumsi, transportasi, atau honorarium kegiatan koordinasi Trantumb.	ROO.25.99.37.10	Kasi Trantumb	Keterlambatan pada satu sumber harga, seperti penawaran penyedia tertentu.	Internal	C	Menurunya kepercayaan publik dan penyedia terhadap proses pengadaan.	Kecamatan						Penggunaan referensi harga dari e-Katalog, daftar harga resmi, atau hasil survey pasar.	Penggunaan data harga historis tanpa pembaruan berkala.	Melakukan pembaruan data harga secara berkala, terutama untuk barang dengan fluktuasi harga tinggi.	Kasi Trantumb	Januari - Desember 2025
11	Kecamatan Babat	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sinergitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Nilai Sakip 2. Nilai Manajemen Risiko	Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Risiko Operasional : Sering terjadi gesekan antar organisasi masyarakat	ROO.25.99.37.11	Kasi Pemerintahan	Kurangnya komunikasi dan forum dialog antar organisasi masyarakat	1. Internal 2. Eksternal	C	Meningginya potensi konflik sosial dan gangguan ketentraman masyarakat.	Kecamatan						Koordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah desa/keurahan.	Belum adanya forum komunikasi rutin antar organisasi masyarakat.	Membentuk forum komunikasi dan dialog antar organisasi masyarakat.	Kasi Pemerintahan	Januari - Desember 2025
									Risiko Kemitraan : Terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan informasi yang diberikan.	ROO.25.99.37.11	Kasi Pemerintahan	Kurangnya koordinasi yang menyebabkan kesalahpahaman.	1. Internal 2. Eksternal	C	Informasi yang diterima tidak jelas.	Kecamatan					Mengadakan forum-forum diskusi dan komunikasi bersama tokoh masyarakat.	Tingkat kehadiran masyarakat masih rendah.	Mengadakan forum diskusi di setiap desa.	Kasi Pemerintahan	Januari - Desember 2025	
									Risiko Fraud : Kurangnya verifikasi internal atas laporan kegiatan.	ROO.25.99.37.11	Kasi Pemerintahan	Phaik yang menangani kurang memahami dan bertanggungjawab mengenai tupoksi pekerjaannya.	Internal	C	Laporan yang diterima cenderung banyak kesalahan.	Kecamatan					Melakukan pembinaan kepada pegawai yang menangani.	Sering dijumpai masih saja dalam melakukan tugasnya.	Membuat Checklist daftar pemeriksaan, yang diketahui oleh pimpinan untuk dilakukan verifikasi oleh pimpinan.	Kasi Pemerintahan	Januari - Desember 2025	
12	Kecamatan Babat	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sinergitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Nilai Sakip 2. Nilai Manajemen Risiko	Fasilitas, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Risiko Operasional : Pelaksanaan fasilitas dan pengawasan sering tertunda.	ROO.25.99.37.12	Kasi Pemerintahan & Kasi PPM	Terjadinya benturan agenda atau keterbatasan waktu.	Internal	C	Jadwal fasilitas sering berubah-ubah.	Kecamatan					Sudah dibuatkan jadwal fasilitas.	Banyaknya agenda mendadak yang mengakibatkan agenda tidak terselesaikan secara maksimal.	Memantau agenda dari pimpinan hingga pegawai yang menangani secara maksimal.	Kasi Pemerintahan & Kasi PPM	Januari - Desember 2025	
									Risiko Kemitraan : Fasilitas di tingkat Desa kurang mencukupi.	ROO.25.99.37.12	Kasi Pemerintahan & Kasi PPM	Rangkap tugas oleh aparat desa sehingga fokus kerja tidak optimal.	Eksternal	C	Kualitas pelayanan kepada masyarakat menurun.	Kecamatan					Pemanfaatan tenaga pendamping desa untuk kegiatan tertentu.	Distribusi beban kerja belum seimbang antar perangkat desa.	Monitoring dan evaluasi kinerja aparat desa secara berkala.	Kasi Pemerintahan & Kasi PPM	Januari - Desember 2025	
									Risiko Fraud : Kegiatan fasilitas Rawan terjadi gratifikasi.	ROO.25.99.37.12	Kasi Pemerintahan & Kasi PPM	Kurangnya integritas aparat desa pengawasan dan pembinaan.	Internal	C	Proses pembinaan dan pengawasan tidak maksimal.	Kecamatan					Telah dibuatkan pakta integritas.	lemahnya pengawasan dari atas.	Penekanan dan pembinaan oleh atas.	Kasi Pemerintahan & Kasi PPM	Januari - Desember 2025	